

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAYA SAING PERTANIAN PROVINSI PAPUA BARAT

Galih Wahyu Hidayat

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat
Jl. Base Camp, Kompleks Perkantoran Pemda Papua Barat, Manokwari
Email : galihwahyu@pertanian.go.id

ABSTRAK

Potensi sumberdaya lahan di Papua Barat sangatlah besar untuk kegiatan pembangunan pertanian. Daya saing pertanian menjadi kunci untuk percepatan pembangunan pertanian, karena daerah yang memiliki daya saing pertanian yang bagus akan mampu menumbuhkembangkan setiap aspek usahatani dalam rangka optimalisasi sumberdaya lahan guna meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan daya saing pertanian diperlukan berbagai upaya dan kebijakan dari stakeholder guna meningkatkan pengaruh dari beberapa faktor yang menjadi titik ungit dari pembangunan pertanian. Kerjasama dan koordinasi antara *stakeholder* dalam menjalankan setiap kebijakan menjadi kunci utama dalam keberhasilan meningkatkan daya saing pertanian. Berdasarkan hasil analisis PPA diketahui bahwa lima faktor yang mempengaruhi dan dapat menjadi titik ungit peningkatan daya saing pertanian adalah sebagai berikut : a). Tingkat kepadatan penduduk, b). Rata-rata penguasaan lahan pertanian, c). Kapasitas lembaga pengembangan pertanian, d). Tingkat intensifikasi pertanian, e). Tingkat ketersediaan aslin olah tanah. Masing-masing dari faktor tersebut memiliki pengaruh yang kuat karena kompleksitas permasalahan sendiri-sendiri sehingga opsi kebijakan yang dapat diambil juga berbeda. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan dalam merumuskan kebijakan, strategi dan terobosan guna meningkatkan daya saing produk pertanian baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kata kunci : *daya saing pertanian, faktor yang berpengaruh, opsi kebijakan*

PENDAHULUAN

Papua Barat memiliki sumberdaya lahan pertanian yang luar biasa potensial dalam berperan sebagai penghasil pangan serta sumber pendapatan petani dan pemerintah daerah. Upaya untuk mengembangkan pertanian melalui pengaturan serta penguasaan dan pengendalian terhadap faktor-faktor produksi perlu dilakukan. Mengingat sebagian besar masyarakat etnis Papua maupun masyarakat pendatang masih menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan. Karena itu usaha pengembangan dan pembangunan pertanian secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup, pendapatan dan kesejahteraan mereka. Potensi sumberdaya lahan untuk Pertanian di Papua Barat sangat besar dan diperlukan berbagai upaya untuk mengoptimalkannya guna kepentingan masyarakat.

Luas wilayah Provinsi Papua Barat 138.385 km², yang masih merupakan kawasan hutan seluas 97.239 km².

Berdasarkan luasan wilayah tersebut sekitar 9,9 juta hektar sangat berpotensi untuk pembangunan pertanian dalam arti luas, dan seluas 2,7 juta hektar berpotensi untuk pertanian (pangan dan hortikultura, baru sekitar 33%). Kondisi tanah-tanah di Papua Barat bersolum sedang sampai tebal 75 – 100 cm) dengan reaksi tanah masam sampai agak masam. Dan KTK tanah rendah sampai sedang. Kandungan bahan organik rendah dan miskin hara (N,P,K). Pada kondisi ini komoditas potensial yang tepat dikembangkan di Papua Barat adalah tanaman-tanaman perkebunan. Saat ini terdapat sekitar 245.000 hektar lahan perkebunan, sedangkan lahan sawah kurang lebih 7.500 hektar. Kelapa sawit dan kakao merupakan tanaman perkebunan utama yang ada di setiap kabupaten, yang diusahakan oleh perusahaan dan perkebunan rakyat dengan pola PIR serta kepemilikan secara individu. Komoditi lain yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat adalah kopi, pala, kelapa dan tanaman hortikultura (bawang, kol, sawi, pisang, nanas dan mangga). Selain itu terdapat produk ternak yang menjadi unggulan yaitu

ternak sapi yang dikembangkan di wilayah-wilayah tertentu.

Pembangunan pertanian dalam perspektif pembangunan nasional harus diletakkan dalam kedudukan yang seimbang dengan pembangunan sektor ekonomi lain dalam kerangka industrialisasi secara bertahap, artikulatif dan berimbang berbasis pertanian. Strategi implementasi Pembangunan Pertanian berkelanjutan dapat dilakukan melalui 1). Reorientasi pembangunan dari pembangunan ekonomi konvensional ke arah pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. 2). Memposisikan pertanian sebagai sektor andalan dalam pembangunan nasional. 3). Mewujudkan kemandirian pangan secara berkelanjutan. 4). Mengurangi jumlah petani miskin dan membangun partisipasi petani 5). Pertanian untuk pembangunan mampu memadukan pertumbuhan pemerataan dan keberlanjutan. 6). Membangun sistem agribisnis berdaya saing dan berkelanjutan. (Daryanto, Arief. 2012).

Selama ini pembangunan pertanian di pedesaan cenderung dilakukan dalam perspektif ekonomi dan proyek dibandingkan perspektif sosiologis. Pembangunan pertanian dan pedesaan lebih mengutamakan introduksi inovasi teknologi dan cenderung seragam untuk seluruh Indonesia. Pendekatan ini sebenarnya sesuai bagi masyarakat pedesaan yang telah memiliki dasar pengetahuan dan ketrampilan teknik budidaya pertanian maju, dengan corak usaha komersial. Sementara di bagian lain di Indonesia masyarakat pedesaan bertani dengan menerapkan teknik budidaya secara tradisional, bahkan ada masyarakat pedesaan yang cenderung meramu seperti halnya golongan masyarakat petani etnik Papua. Pelaksanaan pembangunan pertanian dan pedesaan yang mereka perlukan adalah dalam perspektif sosiologis, dan belum membutuhkan perspektif ekonomi. Dari segi ini dipandang perlu untuk memahami pembangunan pertanian dan pedesaan dalam perspektif sosiologis di provinsi Papua Barat. (Merlyn Lekitoo, dkk. 2011).

Berangkat dari beberapa latar belakang tersebut maka diperlukan sebuah upaya yang sinergis untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan dengan menentukan kebijakan yang strategis. Untuk dapat meningkatkan

daya saing pertanian diperlukan titik ungkit dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Perspektif untuk menentukan berbagai opsi kebijakan diperlukan perspektif secara ekonomi maupun perspektif sosiologis.

Daya saing suatu daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan dan mengelola sampai dengan memasarkan berbagai hasil produk pertanian baik mentah, setengah jadi maupun siap konsumsi sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki dan kapasitas produksi yang ada di daerah tersebut. Daya saing ini akan menunjukkan tingkat kesiapan dan kemandirian suatu daerah untuk berdiri di atas kakinya sendiri dalam bidang pertanian. Faktor yang mempengaruhi cukup banyak, baik internal maupun eksternal dari suatu wilayah.

Menurut Simatupang, P., (2016), daya saing pertanian daerah ialah kemampuan suatu daerah untuk menumbuhkembangkan agribisnis dengan menyediakan fasilitas, perlindungan, pemberdayaan dan regulasi yang kondusif dalam pemanfaatan optimal sumberdaya daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan petani secara berkelanjutan di daerah tersebut.

Untuk meningkatkan daya saing pertanian di Provinsi Papua Barat diperlukan berbagai kebijakan dari stakeholder guna meningkatkan pengaruh dari beberapa faktor yang menjadi titik ungkit dari pembangunan pertanian. Kerjasama dan koordinasi antara stakeholder dalam menjalankan kebijakan menjadi kunci utama dalam keberhasilan meningkatkan daya saing pertanian.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada triwulan ke-tiga tahun 2016, dengan cara pengisian kuesioner untuk responden yang mewakili lembaga yang terkait dengan kebijakan pertanian di Provinsi Papua Barat antara lain yaitu: Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, KADIN, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, KTNA, Bakorluh, Dinas PU, Badan Ketahanan Pangan, Kelompok Tani dan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Papua. Adapun kuesioner yang dibagikan terdiri dari 4 Pilar yang terdiri dari : 1). Karakteristik dan

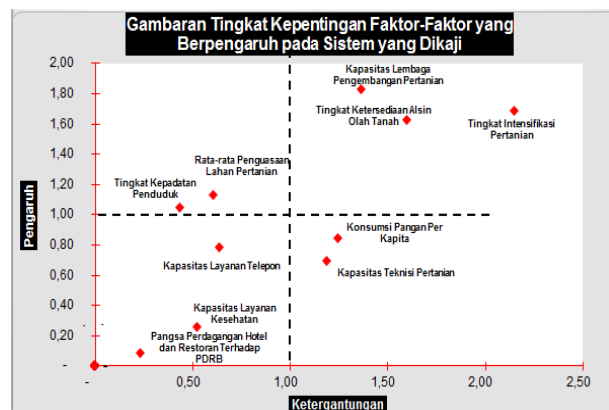
Daya Dukung Wilayah, 2). Kapasitas Usaha Pertanian (Agribisnis), 3). Tatakelola Pemerintahan (Governance), 4). Kinerja Pertanian Daerah. Masing-masing pilar memiliki indikator yang berbeda. Responden akan memberikan penilaian terhadap masing-masing indikator berdasarkan latar belakang masing-masing.

Data primer dan data sekunder yang telah diisi kemudian dikumpulkan di tingkat provinsi berdasarkan kriteria dan indikator daya saing yang sudah diisi oleh responden. Data isian kuesioner tersebut selanjutnya dianalisis oleh peneliti PSEKP (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian) dengan menggunakan metode *Analysis Hierarchy Process (AHP)*, *Multidimensional Scalling (MDS)*, *Analysis dan Participatory Prospective Analysis (PPA)*. Dari hasil analisis data tersebut diperoleh 10 indikator yang merupakan faktor yang berpengaruh menjadi titik ungkit daya saing pertanian di Provinsi Papua Barat. Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada 5 faktor yang memiliki pengaruh kuat terhadap daya saing dari 10 faktor yang dihasilkan dari program PPA tersebut di atas. Dari ke 5 faktor tersebut dapat diketahui tingkat kepentingan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi daya saing pertanian. Pembahasan tulisan ini berdasarkan tingkat pengaruh dan ketergantungan terhadap daya saing pertanian provinsi Papua Barat, sehingga dapat dijadikan salah satu rumusan kebijakan untuk meningkatkan daya saing pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil dari analisis data dari peneliti PSEKP (Pusat Sosial Ekonomi Pertanian) terhadap 4 pilar yang telah ditentukan dalam kuesioner yaitu 1). Karakteristik dan Daya Dukung Wilayah, 2). Kapasitas Usaha Pertanian (Agribisnis), 3). Tatakelola Pemerintahan (*Governance*), 4). Kinerja Pertanian Daerah. Masing-masing pilar memiliki beberapa aspek dan indikator. Diketahui bahwa di Provinsi Papua Barat setelah dilakukan analisis *Analysis Hierarchy Process (AHP)*, *Multidimensional Scalling (MDS)*, *Analysis dan Participatory Prospective Analysis (PPA)* terdapat 5 faktor yang berpengaruh secara kuat terhadap daya saing pertanian. Ke-lima faktor tersebut dapat

disebut sebagai titik ungkit dalam peningkatan daya saing pertanian. Masing-masing dari faktor tersebut memiliki kompleksitas permasalahan sendiri-sendiri sehingga opsi kebijakan yang dapat diambil juga berbeda, masing-masing faktor dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan, strategi dan terobosan guna meningkatkan daya saing produk pertanian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lima faktor yang berpengaruh rendah terhadap upaya meningkatkan daya saing pertanian di Papua Barat adalah : a). Pangsa Perdagangan Hotel dan Restoran terhadap PDRB, b). Kapasitas Layanan Kesehatan, c). Kapasitas Layanan Telepon, d). Konsumsi Pangan Per Kapita, e). Kapasitas Teknisi Pertanian. Kelima faktor tersebut tidak dibahas dalam tulisan ini karena pengaruhnya yang rendah. Sementara posisi dari lima faktor yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan daya saing pertanian dapat ditunjukkan pada kuadran di Gambar 1.



Gambar 1. Hasil analisis PPA : Tingkat kepentingan faktor-faktor yang berpengaruh

Pembahasan pada tulisan ini dibatasi pada faktor-faktor yang berpengaruh secara kuat yaitu 5 faktor yang berada pada kuadran I dan II sebagai berikut ini :

a). *Tingkat Kepadatan Penduduk*,

Data dari BPS Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Papua Barat 765.258 jiwa pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 893.362 jiwa pada tahun 2016 dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 s/d 2016 sebesar 2,61%. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2016 sebesar 8,96 jiwa/km². Data ini belum bisa dipilah untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk agraris sesuai

dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dibandingkan dengan luas lahan pertanian yang dapat digarap oleh penduduk.

b). Rata-rata penguasaan lahan pertanian,

Berdasarkan data BPS, rata-rata tingkat kepadatan penduduk pada tahun (2016) sebesar 8,96 jiwa/km². Jumlah rumah tangga pertanian di Provinsi Papua Barat Tahun (2013) tercatat sebanyak 70.223 rumah tangga. mengalami penurunan sebanyak 5.567 rumah tangga atau sebesar 7,3% dibandingkan dengan jumlah rumah tangga pertanian pada tahun 2003 sebanyak 75.790. Apabila dibandingkan dengan luas ketersediaan sawah baik irigasi maupun non irigasi yang ada di sebanyak 19.661 Ha maka setiap rumah tangga pertanian akan memiliki rata-rata penguasaan lahan pertanian sebesar 2,78 km²/RT. Hal ini akan menjadi catatan tersendiri mengingat kemampuan dan komposisi di anggota keluarga setiap rumah tangga pertanian dalam mengelola lahan pertanian khususnya padi sawah sangatlah berbeda satu sama lain.

c). Kapasitas lembaga pengembangan pertanian,

Melalui pengkajian kelembagaan perbenihan telah diketahui bahwa kondisi kelembagaan perbenihan di Papua Barat belum berjalan secara optimal. Melalui rekayasa kelembagaan mampu memperbaiki hubungan kinerja antar subsistem kelembagaan, mulai dari BBI, BBU, BPSB, penangkar benih dengan BPTP Papua Barat. Disarankan agar program BLBU khususnya di Papua Barat masih perlu dipertahankan, sejalan dengan itu proses pengadaan benih BLBU perlu mengutamakan produk-produk benih bermutu hasil penangkar yang telah dibina. Kegiatan pembentukan dan pembinaan penangkar benih padi perlu dikembangkan ke kabupaten lain, seperti kabupaten Sorong, Bintuni, dan Fak-fak. Daerah tersebut potensial untuk pengembangan padi, sehingga diperlukan kemudahan dalam penyediaan benih bermutu. (Ruku, Z. 2011). Sumberdaya penyuluh (tenaga penyuluh, prasarana, dan sarana penyuluhan) belum memadai untuk semua tingkatan kelembagaan penyuluh di Papua Barat sehingga pelaksanaan penyuluhan belum dilaksanakan

secara optimal, materi penyuluhan masih lemah, metode yang digunakan juga masih lemah. (Sutisna, 2014).

Dari hasil dua kajian di atas, kelembagaan pengembangan pertanian yang ada sangat berpengaruh karena jumlah lembaga-lembaga tersebut akan dibandingkan dengan jumlah per 1000 rumah tangga pertanian. Terlihat jelas bahwa kapasitas lembaga pengembangan pertanian belum ideal. Sehingga diperlukan sebuah opsi kebijakan dari pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan pengembangan pertanian.

d). Tingkat Intensifikasi Pertanian,

Berbicara tentang intensifikasi pertanian tidak lepas dari produktivitas aktual dan produktivitas potensial yang dimiliki oleh beberapa varietas tertentu yang pernah dikembangkan di Provinsi Papua Barat. Sebagai gambaran mengenai kondisi yang ada di lapangan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Produktivitas Aktual dan Produktivitas Potensial dari Varietas Padi Sawah

Varietas	Produktivitas Aktual*	Produktivitas Potensial**	Tingkat Intensi fikasi %
Inpari 7	4,35	4,8	90,63
Inpari 10	3,18	6,2	51,29
Inpari 11	4,36	6,5	67,08
Inpari 13	4,03	6,6	61,06

Sumber :

* Laporan Pendampingan SL-PTT Padi di Papua Barat (Rauf, dkk., 2011)

** Rata-rata hasil berdasarkan deskripsi varietas padi (Balitbangtan, 2013)

Tingkat intensifikasi pertanian yang ditunjukkan pada tabel 1 di atas berkisar antara 51,29% sampai dengan 90,63% artinya dapat dikatakan bahwa kajian adaptasi SL PTT secara intensif beberapa varietas padi yang pernah dilakukan oleh BPTP Papua Barat sangat berpeluang dalam mencapai produktivitas potensial yang dihsaikan oleh produktivitas aktual dibagi dengan produktivitas potensial dikalikan 100%.

Intensifikasi pertanian secara luas termasuk di dalamnya adalah intensifikasi peternakan, yang merupakan angka yang menunjukkan populasi ternak yang dipelihara secara intensif dibandingkan dengan total populasi ternak. Belum diketahui secara pasti

populasi ternak sapi potong yang dipelihara secara intensif yang ada di Provinsi Papua Barat karena pada umumnya pemeliharaan ternak sapi potong dengan metode kandang hamparan atau di lepas di hutan.

Dari data BPS Provinsi Papua Barat (2017) dapat dipergunakan untuk melihat kebutuhan pemenuhan komoditas unggulan yang berupa unggas dan sapi potong. Perbandingan antara populasi dan konsumsi atau yang dipotong ditunjukkan pada Tabel 2. Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah populasi dengan jumlah yang dipotong atau yang dikonsumsi, dapat dikatakan bahwa kebutuhan konsumsi masih terpenuhi dari daerah sendiri. Peningkatan tingkat kepadatan penduduk sesuai laju pertumbuhannya 2,61% per tahun apabila dibandingkan dengan jumlah populasi ternak yang ada, dianggap masih belum aman untuk pemenuhan konsumsi daging dari sapi maupun unggas di daerah. Sehingga kegiatan intensifikasi pertanian khususnya peternakan perlu ditingkatkan.

Hal tersebut di atas selaras dengan pendapat Simatupang dan Hadi. (2004). Dimana Pengembangan agribisnis peternakan sebaiknya diarahkan untuk memenuhi permintaan pasar domestik yang terus meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi, pertambahan penduduk, urbanisasi dan perubahan pola makanan penduduk. Permintaan pasar domestik masih jauh dari terpenuhi, bahkan Indonesia masih harus mengimpor berbagai produk peternakan dalam jumlah yang semakin besar.

e). Tingkat Ketersediaan Alsin Olah Tanah.

Berdasarkan data dari Statistik Dirjen Saprasi Kementan Tahun 2016, diketahui rekap data jumlah alsin olah tanah yang ada di Provinsi Papua Barat dapat dicermati pada tabel 3.

Jumlah alsin olah tanah di atas belum bisa menunjukkan jumlah riil alsin olah tanah yang ada dilapangan karena masyarakat dan petani juga memiliki alsin olah tanah pribadi. Apabila dikaitkan dengan luas baku areal sawah irigasi kurang lebih 7.500 Ha maka jumlah penggunaan alsin olah tanah berupa traktor sebanyak 938 buah. Tentunya sampai dengan saat ini jumlah tersebut sudah berkembang menjadi lebih banyak. Tingkat ketersediaan alsin olah tanah sangat terkait dengan ketersediaan tenaga kerja dimana dari tahun ke tahun jumlah tenaga kerja di bidang pertanian cenderung menurun. Penurunan ini karena generasi muda lebih berminat beralih ke pekerjaan di bidang industri dan jasa yang dirasa lebih menguntungkan dan proses pekerjaan yang tidak rumit. Selain hal tersebut adanya anggapan bahwa sebagian orangtua atau pekerja di bidang pertanian beranggapan bahwa tingkat kesuksesan seseorang apabila bisa meningkatkan taraf hidup anak keturunannya dengan pekerjaan yang lebih baik, sehingga pekerjaan di bidang pertanian cenderung dihindari oleh anak muda. Permasalahan ini dapat diatasi dengan adanya alsin olah tanah. Luasan lahan sawah bisa digarap lebih efisien dari segi waktu dan biaya dengan adanya alsin olah tanah.

Tabel 2. Populasi dan Konsumsi Ternak di Papua Barat Tahun 2016

Komoditas Ternak	Populasi (ekor)	Dipotong (ekor)	Keterangan
Sapi Potong	68.999	23.459	Potensi tiap Kabupaten berbeda
Ayam Kampung	1.841.816	1.657.636	
Ayam Petelur	68.652	45.997	
Ayam Broiler	1.598.236	1.390.465	
Itik	55.062	33.036	

Sumber : Diolah dari Papua Barat Dalam Angka (BPS, 2017)

Tabel 3. Jumlah Alsin Olah Tanah di Papua Barat Tahun 2011-2015

Jenis Alsin	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Traktor Roda 2	11	19	41	85	259	415
Traktor Roda 4	3	1	0	0	15	19

Sumber : Statistik Prasarana dan Sarana Pertanian, 2016

Tabel 4. Faktor yang berpengaruh, Opsi Kebijakan dan Lembaga Terkait

Faktor Yang Berpengaruh	Opsi Kebijakan Yang Dapat Diambil	Lembaga Terkait
Tingkat Kepadatan Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemetaan tentang jumlah RT Pertanian dan luas wilayah pertanian Melakukan pengembangan wilayah garapan pertanian baru (contoh program upus cetak sawah) Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian baru yang mampu menyerap tenaga kerja pertanian 	Bappeda Dinas Pertanian Investor Swasta
Rata-rata Penguasaan Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> Pemetaan Lahan-lahan pertanian produktif yang belum tergarap Pendataan RT Pertanian yang belum memiliki garapan optimal Memberikan informasi tentang prosedur tata cara pemanfaatan lahan pertanian yang belum tergarap Memberikan advokasi dan pendampingan kepada RT pertanian dan masyarakat dalam mengelola lahan untuk peningkatan produktivitas 	Bappeda, Dinas Pertanian, BPN, Bag Hukum Kantor Kominfo,
Kapasitas Lembaga Pengembangan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga pertanian. Memonitor dan mengevaluasi kapasitas lembaga pertanian Meningkatkan kapasitas dengan melakukan pendampingan dan supervisi 	Bappeda, Dinas Sosial, Kemen Kop dan UKM, Dinas Pertanian BPTP
Tingkat Ketersediaan Alsintan Olah Tanah	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas penggunaan alsintan untuk peningkatan produksi pertanian dengan berupaya meningkatkan jumlah penggunaan, kelembagaan alsintan Peningkatan kualitas dan kontinuitas sparepart dan bahan bakar alsintan Penggunaan alsintan yang spesifik lokasi serta mudah digunakan oleh petani 	Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja
Tingkat Intensifikasi Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dari intensifikasi pertanian dengan mempertimbangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas riil. 	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, BPTP

Sumber : Dianalisis dari data primer, 2016.

Selain permasalahan tenaga kerja juga perlu dipertimbangkan mengenai permasalahan kelembagaan pengelolaan alsintan. Untuk meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan alsintan diperlukan juga jaminan kepastian *sparepart* dan bahan bakar di lapangan. Menurut penelitian Mardinata dan Zulkifli (2014), konsumsi kebutuhan bahan bakar untuk hand traktor adalah 2,066 liter/jam sementara kapasitas kerja rata-rata 2,492 jam/hektar atau dapat dikatakan kebutuhan bahan bakar sebanyak 5,15 liter/hektar. Jika diasumsikan luas lahan sawah yang tergarap kurang lebih 7500 hektar maka diperlukan 38.625 liter bahan bakar. Jumlah yang relatif banyak dan diperlukan kepastian ketersediaannya pada setiap musim tanam berjalan karena tahapan pengolahan tanah bisa menjadi beberapa tahap setiap

hektarnya tergantung dari kondisi masing-masing lahan garapan.

Dari pembahasan masing-masing faktor yang berpengaruh di atas dapat disusun dalam tabel mengenai beberapa opsi kebijakan yang dapat diambil dan beberapa lembaga yang terkait guna meningkatkan daya saing pertanian sesuai dengan Tabel 4.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing pertanian : 1). Tingkat kepadatan penduduk, 2). Rata-rata penguasaan lahan pertanian. 3). Kapasitas lembaga pengembangan pertanian, 4). Tingkat ketersediaan alsintan 5). Tingkat intensifikasi pertanian.

Masing-masing dari faktor tersebut memiliki kompleksitas permasalahan sendiri-sendiri sehingga opsi kebijakan yang dapat diambil juga berbeda. Kerjasama dan koordinasi antara *stakeholder* dalam menjalankan setiap kebijakan menjadi kunci utama dalam keberhasilan meningkatkan daya saing pertanian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan dalam merumuskan kebijakan, strategi dan terobosan guna meningkatkan daya saing produk pertanian baik jangka pendek maupun jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2016. *Statistik Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2011-2015*. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta
- Daryanto, Arief. 2012. *Memposisikan secara Tepat Pembangunan Pertanian dalam Perspektif Pembangunan Nasional*. Prosiding seminar petani dan Pembangunan Nasional. Pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Departemen Pertanian.
- Entis Sutisna. 2014. *Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian di Papua Barat*. Laporan Akhir Kegiatan. BPTP Papua Barat. Manokwari.
- Merlyn Lekitoo, dkk. 2011. *Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Dalam Perspektif Sosiologis di Papua Barat*. Prosiding seminar Nasional Akselerasi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Berbasis Inovasi. Universitas Negeri Papua. Manokwari.
- Pantjar Simatupang dan Prajogo U. Hadi. 2004. *Daya Saing Usaha Peternakan Menuju 2020*. Jurnal WARTAZOA Vol. 14No. 2 Th .
- Pantjar Simatupang, 2016. *Konsep Daya Saing*. Materi Workshop Analisis Daya Saing Pertanian Indonesia. PSEKP (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian). Bogor. Tidak Dipublikasikan.
- Rauf, Abdul Wahid, dkk. 2011. *Pendampingan SL PTT Padi*. Laporan Akhir Tahun. BPTP Papua Barat. Manokwari.
- Zubaedah Ruku. (2011). *Kajian Kelembagaan Perbenihan Padi di Papua Barat*. Laporan Akhir Kegiatan. BPTP Papua Barat. Manokwari.
- Z. Mardinata dan Zulkifli. 2014. *Analisis Kapasitas Kerja dan Kebutuhan Bahan Bakar Traktor Tangan Berdasarkan Variasi Pola Pengolahan Tanah, Kedalaman Pembajakan dan Kecepatan Kerja*. Agritech Vol.34, No 3. Agustus 2014. Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Yogyakarta.